

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH; KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA TENGAH

Nomor : KB/1/XI/2021

Nomor : 973/17.698

Nomor : P/32/SP/2021

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT JAWA TENGAH



TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP	SAMSAT JAWA TENGAH / SOP / 2021 / 005
Tgl. Pembuatan	25 Oktober 2021
Tgl. Revisi	25 Oktober 2023
Tgl. Efektif	24 November 2021
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	PELAYANAN MUTASI MASUK (DARI DALAM DAN LUAR PROVINSI)

Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan;
- Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor ;
- Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor

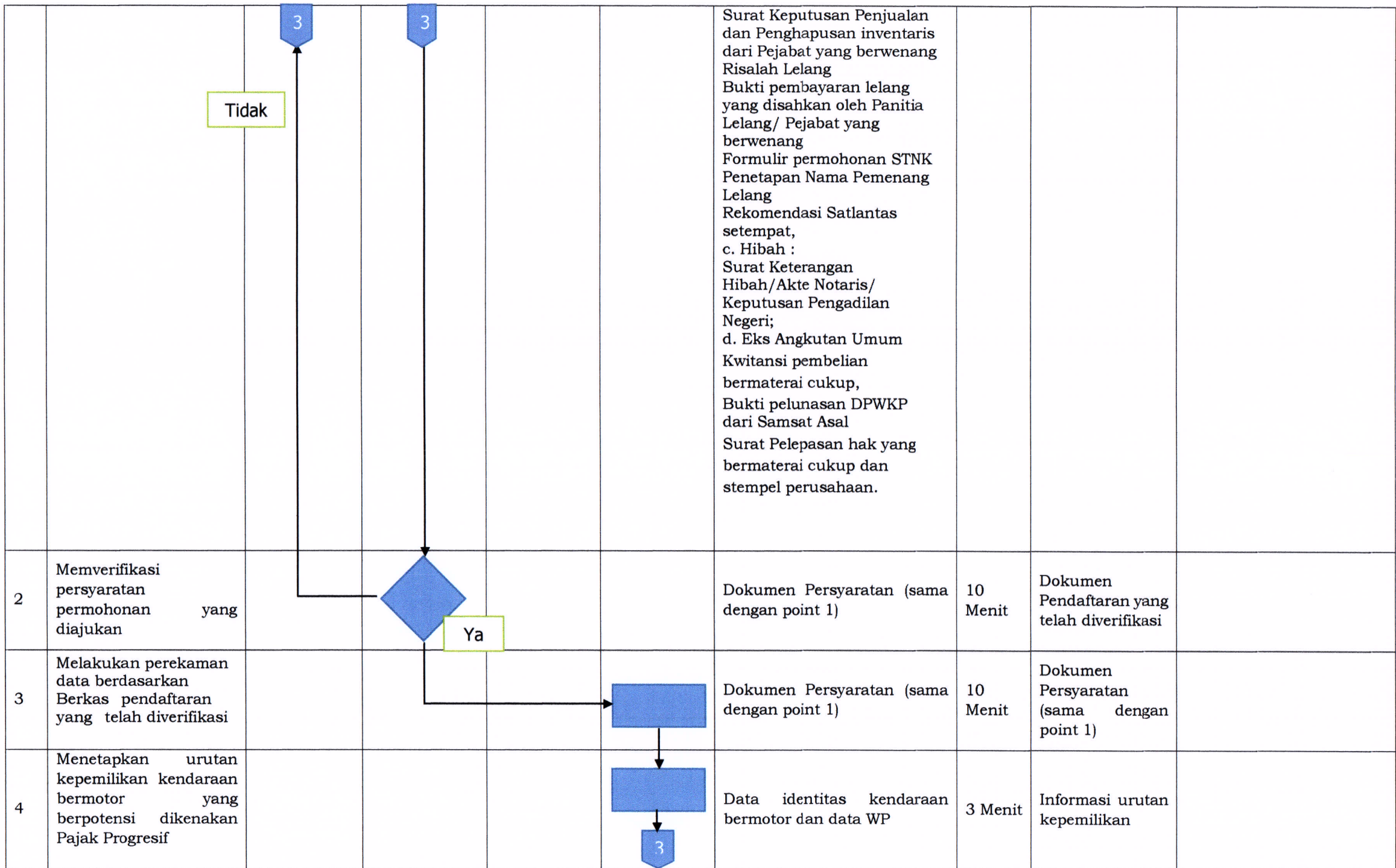
Kualifikasi Pelaksana

- Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Dalam dan Luar Provinsi ;
- Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;
- Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;
- Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan ramah, tepat dan informatif..
- Mampu memahami NJKB
- Mampu memahami Tarif SWDKLLAJ
- Mampu mengidentifikasi Uang Palsu

6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; • Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta perubahannya Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017; • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; • Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;	• Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu; • Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
• SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Baru • SOP Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam dan Luar Provinsi) • SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap • SOP Pelayanan Pembatalan Mutasi Keluar • SOP Pelayanan Perubahan Warna • SOP Pelayanan Ganti Nopol • SOP Pelayanan Alih Fungsi dan Perubahan Bentuk • SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBN II)	• Komputer; • Aplikasi Komputer; • Jaringan Data; • Database Kendaraan Bermotor; • Formulir Permohonan; • Alat Detektor Uang Palsu; • Alat Tulis Kantor. • Kas Register; • Alat pencetak TNKB; • Alat pencetak STNK.
Peringatan	Pencataan dan Pendataan
• Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor/ wajib pajak;	• Disimpan sebagai arsip manual

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	PETUGAS JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Pendaftaran Mutasi Masuk	MULAI 1	1			Dokumen Persyaratan : Identitas diri - Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/ SIM/ KK/ Pasport/KTA sesuai dengan STNK) - Badan : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan ; NPWP, NIB - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, Keterangan Domisili. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari : - Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi; - Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui			Persyaratan sesuai dengan proses Regident Ranmor yang diajukan

		2	2		batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; atau - Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. - Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. - Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening - Surat keterangan asal usul kendaraan • Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor; • SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani • Dokumen kendaraan dari samsat asal • STNK; • SKKP Terakhir; • BPKB; • Bukti Pelunasan BPKB; • Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Samsat Asal; Persyaratan Tambahan : - Jual Beli Kwitansi pembelian bermaterai cukup - Balik Nama Eks Lelang Kendaraan Dinas Milik Negara			
--	--	---	---	--	--	--	--	--



5	Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNPB dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan Mencetak SKKP		4	- Dokumen Persyaratan sama dengan point 1; - NJKB dan tarif BBNKB, PKB, SWDKLLAJ, PNPB	5 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	•Penetapan besaran PNPB, BBNKB, PKB, SWDKLLAJ berdasar Jenis, Merk, Type, Tahun Buat, Silinder Mesin, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), Bobot Kendaraan, Bentuk/ Fungsi, Warna Plat, Alamat Pemilik dan Urutan Kepemilikan.
6	Memverifikasi SKKP		Tidak	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang terverifikasi	
7	Menerima Pembayaran SKKP		Ya	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Pembayaran sesuai SKKP	3 Menit	SKKP tervalidasi/ yang sudah di sahkan	Melalui kasir Bank Jateng bagi yang sudah dengan Kasir Bank Jateng, PNPB melalui Kasir BRI bagi yang sudah ada Kasir BRI
8	Mencetak STNK			SKKP Teregister	2 Menit	STNK	
9	Mencetak TNKB			STNK, SKKP Teregister	5 Menit	TNKB	
10	Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB						
11	Mengarsipkan dokumen ranmor		SELESAI	Arsip dokumen ranmor			

